

**KONSEP PENDIDIKAN DI INDONESIA DARI ZAMAN
PENJAJAHAN SAMPAI KEMERDEKAAN INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam
Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro**



OLEH :

MOHAMAD ULIL AL BAAB

NIM : 2004.05501.01058

NIMKO : 2004.4.055.0001.2.00985

PRODI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
SUNAN GIRI BOJONEGORO**

2 0 0 9

NOTA PEMBIMBING

Jombang, 29 Mei 2009

Nomor :
Lampiran : 6 Eksemplar
Perihal : Skripsi Saudara Mohamad Ulil Albaab

Kepada
Yth. Dekan Perguruan Tinggi Agama Islam
Sunangiri Bojonegoro
JI. JEND. A. YANI 10 BOJONEGORO

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membimbing, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Mohamad Ulil Albaab
NIM : 200455011058
NIMKO : 2004.4.55.0001.0085
Judul Skripsi : Konsep Pendidikan di Indonesia Dari Zaman Penjajahan Sampai Kemerdekaan

Dengan ini kami mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap maklum dan taklupa kami sampaikan terimakasih.

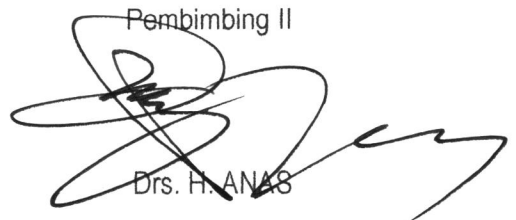
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. SUGENG, M. Ag

Pembimbing II



Drs. H. ANAS

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Almarhum ayah saya dan keluarga tercinta, kiyai dan bunyai, calon istriku tersayang, para guru dan dosen dari mulai SD/MI sampai Perguruan Tinggi, teman-teman dan adik-adik ku tersayang senasib seperjuangan di pondok pesantren Mansya'ul Huda 02, dan semua yang telah ikut dalam penyelesaian skripsi ini.

MOTO

يا ايها الذين ءامنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya".

(Q.S. Al-Maidah : 35)¹

¹ Departemen agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, PT. Mahkota Surabaya, 1989, hal,. 165

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita, sehingga penyusunan skripsi ini dapat di selesaikan.

Gagasan awal penulisan skripsi ini, sebenarnya sudah timbul beberapa bulan yang lalu. semula penulisan kurang begitu yakinakan dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga tak jarang niat penulis juga timbul tenggelam dan terkadang putus asa dalam penyusunannya. Seolah-olah gagasan itu mentah begitu saja. Ketika penulis mencoba berinstropeksi dengan kenangan kenangan masa silam dan melihat fenomena sekitar , dimana tidak sedikit dari kawan-kawan yang sepeerjuangan telah memfiniskan skripsinya masing-masing serta banyak spirit dari orang-orang sekitar, barulah penulis memberanikan diri untuk melanjutkan topik dalam skripsi ini secara lebih serius.

Bagi penulis, walaupun halangan, rintangan dan hambatan selalu saja ada dari aral melintang dan merintang jalan, hingga tak jarang penulis menjadi down , sport jantung, belum lagi persoalan pribadi (si-Dia, tumpuhan hati) yang sejak mulai awal penulis memasuki bangku perkuliahan selalu setia mendampingi kini sudah semakin jauh dan jauh dari hatidan jangkauan penulis.

Namun mengingat penulisan skripsi ini adalah merupakan tugas dan keharusan akademis yang penuh tanggung jawab yang harus di tuntaskan guna mencapai obsesi penulis dalam meraih strata satu (S-1) sekaligus membuktikan pada keluarga, dan semua orang yang mengenal penulis baik langsung maupun tidak langsung, bahwa penulis sungguh-sungguh untuk meraih obsesi tersebut.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membawa risalah kebenaran abadi sepanjang zaman, yang dapat dijadikan petunjuk bagi perjalanan hidup manusia.

Sebagai karya ilmiah, tulisan ini bersifat terbuka, mungkin ada beberapa uraian / ulasan didalamnya yang masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu sumbang saran dari pembaca sangat penting bagi penulis dan demi perbaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan yang amat berharga dari banyak pihak. Karenanya ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. MOH. MUNIB, MM., M.Pd.i, selaku rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Bojonegoro.
2. Bapak Drs. SUGENG, M. Ag, dan Bapak Drs. H. ANAS, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
3. Semua dosen yang ada di cabang Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri yang ada di senori yang telah mengajar selama ini yang sehingga penulis dapat menyelesaikan belajar di tingkat perguruan tinggi ini.
4. Ayahanda H. Abd. Rohim (almh) dan Ibunda Khanifa Azzahroh tersayang, yang memang berhak untuk itu semua sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. KH. M. Muhyiddin Munawwar sekeluarga yang telah mendidik dan memberi motifasi selama penulisan skripsi ini.

6. Semua fihak yang ikut membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini (terutama, Abdel muyes, M.fudel, Azizah Nurhayati, Bie-Bie, sayed adulloh, Hasan biesri, dan kawan-kawanku di pondok pesantren Mansya'ul Huda 02.

Akhirnya penulis hanya bisa memohon kepada Alloh SWT, semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapat balasan yang berlipat ganda, amiiin.

Jombang, Mei 2009

Penulis,

Mohamad Ulil Albaab

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAM PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I . PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Penegasan judul	4
C. Alasan memilih judul	4
D. Rumusan masalah	4
E. Tujuan kajian	5
F. Kegunaan kajian	5
G. Metode kajian	6
BAB II . PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA KEMERDEKAAN	10
A. Sistem pendidikan	11
1. Sistem pendidikan persekolahan	12

2. Sistem pendidikan pesantren	19
3. Sistem pendidikan diniyah (<i>Madrasah</i>)	21
B. Perubahan-perubahan system pendidikan	23
BAB III . KEANEKARAGAMAN PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN	28
A. Pendidikan orang dewasa	28
B. Pendidikan luar biasa	32
C. Pendidikan guru	38
D. Pendidikan suwasta	44
BAB IV. HAL-HAL YANG MEMBANTU PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA	48
A. Dari bidang pembangunan	48
B. Dari bidang sosial	52
C. Dari bidang sarana prasarana	56
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	64

DAFTAR PUSTAKA



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
SUNAN GIRI BOJONEGORO**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kata pendidikan di sini memerlukan sedikit keterangan. Dalam arti umum pendidikan mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk di alihkan kepada generasi muda baik dalam segi pengalamannya, pengetahuannya, serta ketrampilannya. Supaya bisa hidup berdampingan dan melaksanakan fungsi hidupnya dengan sebaik-baiknya.¹

Corak pendidikan itu erat hubungannya dengan corak kehidupan, karenanya jika corak kehidupan itu berubah, maka berubah pula corak pendidikannya. Agar semua anak didik yang sekarang ini bisa memasuki dan beradaptasi dengan era globalisasi yang sekarang ini pertama-tama adalah tugas orangtua untuk mendidik anak-anak mereka dan yang kedua adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan untuk warga negaranya agar mereka bisa melaksanakan hak dan kuwajibannya untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran.²

¹ Prof. soegarda poerbakawatja (1970) pendidikan dalam alam Indonesia merdeka.P. T gunung agung, Jakarta hlm. 11

² ibid.

Untuk keperluan itu pemerintah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan memberikan ilmu pengetahuan dan yang merupakan alat untuk mengembangkan anak untuk menjadi orang yang dapat melakukan kewajibannya dengan baik dan benar, dan mempunyai kepribadian yang baik. Pengetahuan yang bermacam-macam sangat erat hubungannya dengan pembentukan kepribadian dan sifat anak didik, dengan pengetahuan yang luas akan menghasilkan kepribadian yang baik.³

Dengan adanya uraian diatas dapatlah kiranya diterima dalam penulisan skripsi ini untuk hanya menggunakan istilah KONSEP PENDIDIKAN DI INDONESIA DARI ZAMAN PENJAJAH SAMPAI KEMERDEKAAN INDONESIA.

Latar belakang sejarah pendidikan di Indonesia selama dua dasawarsa terakhir ini, khususnya antara tahun 145-1965, Universitas di Indonesia sungguh mengalami peningkatan luarbiasa, diantaranya lahirnya Universitas fakultas hukum, fakultas kedokteran, fakultas sastra, fakultas ekonomi, fakultas pertanian dan fakultas teknik yang semua itu berada di wilayah berbeda, diantaranya wilayah Jakarta, Surabaya, Bogor, Bandung, dan Makasar.⁴

Dalam perkembangan selanjutnya dari pendidikan tinggi kita melihat lahirnya dalam tahun 1954 *perguruan tinggi pendidikan guru* (PTPG) dan bersamaan dengan itu lahirnya Universitas Airlangga yang mengakhiri pengembangan Universitas di Surabaya.⁵

³ ibid. hlm. 12

⁴ ibid. hml. 87

⁵ ibid

Selama masa kekuasaan Soekarno, ketika pertumbuhan itu mencapai puncaknya inflasi rupiah tidak dapat di hindari serta tidak adanya perencanaan yang efektif telah menciptakan keadaan di mana merosotnya mutu pendidikan tak terhindarkan. Pemerintah yang sekarang, sejak mengambil alih kekuasaan di tahun 1966 telah menegaskan pendidikan yang baik adalah vital untuk mencapai tujuan-tujuan dasar persatuan nasional pembangunan ekonomi dan sosial. Antara tahun 1966-1971 walaupun tingkat penambahan sekolah masih tinggi, namun terlihat penurunan yang sangat besar serta masih merupakan struktur sistem pendidikan warisan Belanda.⁶

Tidak adanya kebijakan pendidikan yang betul-betul bercorak nasional terlihat jelas sekali ketika pemerintah menyusun repelita pertama. Keuangan Negara baru mulai membaik dari keadaannya yang sangat menyedihkan di akhir masa pemerintahan Soekarno, dan titik berat repelita ke satu bisa di mengerti pada pembangunan ekonomi, karena itu untuk anggaran di bidang pendidikan yang terbesar adalah pendidikan di bidang teknik dan kejuruan di bidang lainnya agak di kesampingkan . Maka dari itu bisa dibayangkan di belakang rencana pendidikan itu layak tapi kabur.⁷

⁶ C.E .Beeby (1979), pendidikan di Indonesia. New Zealand Council for Educational Research Oxford University press, Wellington. hlm. 7

⁷ ibid., hlm. 8

B. PENEGASAN JUDUL

Untuk memadukan dan memperjelas istilah-istilah yang penulis angkat dalam judul “KONSEP PENDIDIKAN DI INDONESIA DARI ZAMAN PENJAJAH SAMPAI KEMERDEKAAN INDONESIA” maka perlu dijelaskan maksud istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut, adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah:

1. Konsep pendidikan di Indonesia adalah pengertian atau pemikiran sistem pendidikan pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak didik berupa materi.
2. Zaman penjajah adalah kehidupan pada waktu Negara Indonesia di jajah oleh para penjajah pada waktu itu.
3. Kemerdekaan Indonesia adalah bebasnya Negara Indonesia dari para penjajah dan mempunyai kedaulatan bangsa dan ber Negara.

C. ALASAN MEMILIH JUDUL

Dalam proses kemajuan dan kemunduran pendidikan di Indonesia ini banyak sekali rintangan-rintangan yang harus ditempuh oleh Negara Indonesia untuk mempunyai kualitas pendidikan yang baik yang sesuai dengan SDM dan SDA yang ada di dalam Negara Indonesia ini.

Maka dari itu penulis ingin menyajikan konsep tentang pendidikan yang ada di Indonesia yang dari waktu ke waktu mulai ada kemajuan dengan melalui perubahan-perubahan sistem pendidikan dari zaman penjajah sampai saat ini.

D. RUMUSAN MASALAH

tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan.

2. Bagi Pendidik

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan para pendidik dalam menerapkan sistem pendidikan.

3. Bagi Penulis

Dengan mengadakan kajian ini penulis berharap dapat ikut berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik di Negara Indonesia ini.

G. METODE KAJIAN

1. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian adalah penelitian pustaka, maka pengambilan data yang diambil dari buku-buku ilmunan, surat kabar, majalah-majalah yang ada kaitannya dengan tokoh yang di ketengahkan pengarang dengan cara menelaah dan menganalisis sumber-sumber data yang ada.

Kemudian dari telaah dan analisa sumber-sumber data itu hasilnya di catat dan dikuwalivikasikan menurut kerangka yang sudah ditentukan. Hal ini berbeda dengan penelitian lapangan yangmana data pokok yang diambil dari lapangan yang biasanya berupa angket yang diisi oleh responden, wawancara atau interview, observasi, serta dokumentasi.

Karena penelitian ini seluruhnya berdasarkan kajian pustaka atau literal, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka. Yang dimaksud dengan penelitian pustaka adalah penelitian yang secara

khusus yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data atau informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang pustaka seperti buku, majalah, dokumen, sejarah, kisah dan artikel.

2. Metode Analisa Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisa menurut beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Pengolahan data secara editing dengan cara memeriksa kembali data-data yang sudah dikumpulkan.
- b. Pengorganisasian data yaitu menyusun dan mensistematis-kan data-data yang sudah diperoleh kedalam kerangka paparan yang sudah di tentukan.
- c. Penemuan hasil yaitu melakukan analisa lanjutan secara kualitatif terhadap hasil pengorganisasian data dengan cara menggunakan kaidah-kaidan serta teori-teori untuk memperoleh kesimpulan atau dengan istilah lain merupakan cara berfikir deduktif. Sedangkan dalam pembahasannya menggunakan metode deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan fakta secara sistematis faktual dan akurat. Dengan kata lain bertujuan untuk menguraikan secara teratur seluruh konsepsi tokoh. Adapun keperluan untuk menganalisis data

digunakan beberapa metode analisa data sebagai berikut:

1. Metode deduksi yaitu proses berfikir yang bergerak dari pernyataan-pernyataan yang umum ke pernyataan-pernyataan yang khusus dengan penerangan kaidah-kaidah logika digunakan untuk memperoleh gambaran detailnya konsep pendidikan di Indonesia.
2. Metode induksi yaitu upaya berfikir yang berangkat dari yang khusus ke peristiwa yang kongkret kemudian data-data itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum dengan kaitannya dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang utuh terhadap pemikiran-pemikiran pendidikan yang ada di Indonesia ini.
3. Metode komparasi yaitu metode dengan cara menggunakan logika perbandingan teori dengan teori dan untuk keragaman teori yang masing-masing mempunyai relevansi dengan penelitian ini, metode komparasi ini digunakan untuk membandingkan pemikiran-pemikiran pendidik yang ada di Indonesia ini sehingga ditemukan persamaan dari sumber-sumber penelitian.

3. Sumber-Sumber Penelitian

Adapun sumber-sumber yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah buku-buku sejarah pendidikan di Indonesia dan pengambilan dari situs-situs sejarah pendidikan di Indonesia.



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
SUNAN GIRI BOJONEGORO**

BAB II

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pada abad ke-18 Eropa dilanda pemikiran aliran baru yang sebenarnya telah dicetuskan pada abad ke-17 aliran baru itu disebut “*Aufklarung*” yang berarti fajar atau terang. Ciri-cirinya antarlain percaya pada nalar, pada sifat-sifat baik yang ada pada manusia, menuju pada arah pri kemanusiaan, menjunjung tinggi akal sehat. Dalam pendidikan agama, pujangga terkenal J.J. Rouseau menganjurkan seorang anak didik untuk dapat memilih sendiri agama yang akan dianutnya dan dianggap paling baik dan benar. Oleh karena itu toleransi beragama adalah salah satu ciri utama dari “*Aufklarung*”. *Aufklarung* ini menjadi pelopor dari sistem pendidikan baru yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh Negara yang kemudian menjelma menjadi bentuk sekolah-sekolah negeri.¹

Datangnya ilmu pengetahuan modern sebagai akibat dari adanya perkembangan intelektual dari abad XIX, mempunyai karakteristik lebih kompleks dari perkembangan intelektual abad sebelumnya. Kemunculannya dipengaruhi oleh beberapa hal. *Pertama*, daerah perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin luas, dimana Amerika dan Rusia memberikan kontribusi yang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta adanya kesadaran bangsa Eropa tentang filsafat India.²

¹ Departemen pendidikan dan kebudayaan, Pendidikan di Indonesia dari zaman kezaman, 1979. Balai pustaka. Hlm. 87

² Ali maksum luluk yunah ruhendi, paradikma pendidikan universal, 2004, penerbit IRCiSoD, gowok Jakarta.

A. SISTEM PENDIDIKAN

Dalam sejarah pendidikan bangsa Indonesia, kita telah menganut sistem yang dibuat oleh belanda, yang dapat kita nyatakan sebagai suatu system kolonial. Dengan aspek colonial-colonialnya yang disesuaikan dengan dasar-dasar dan tujuan Jepang pada masa itu untuk mencapai semua tujuannya di Negara Indonesia ini. Perbedaan pemerintahan Belanda dengan Jepang terletak pada konsekuensi mereka masing-masing. Jepang telah memberikan pendidikan dan harapan untuk kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dan mempunyai batas-batas penjajahan, sedangkan Belanda tidak menepati sama sekali apa yang ia janjikan meskipun telah lahirnya politik etis. Belanda tidak sama sekali melihat kepentingan rakyat pribumi melainkan sebaliknya.³

Pendidikan sekolah akan diperuntukkan hanya untuk golongan-golongan yang membantu pemerintahan kolonial saja. Karena tujuan dari awal mendirikan pendidikan sekolah teknik hanyalah untuk memberi mereka "*skilled*" dan digunakan sebagai pekerja di perusahaan-perusahaan swasta mereka. Pendidikan yang mereka gunakan bersifat intelektualistis

³ Prof soegarda poerbakawatja (1970) pendidikan dalam alam Indonesia merdeka.P.T gunung agung, Jakarta hlm. 125

yang sehingga menghasilkan orang-orang yang mendewa-dewakan otak minoritas adalah golongan elite yang hidup di masa pemerintahan penjajah.⁴ Bangsa Indonesia (pribumi) pada umumnya tertinggal jauh dengan orang-orang yang dikepentingkan oleh pemerintahan penjajah, pendidikan elementer yang diberikan untuk rakyat pribumi diberikan dalam rangka “*politik etis*” dalam sekolah desa tiga tahun tanpa “*follow-up*” sesudah beberapa waktu tidak meninggalkan bekas-bekas kepandaian membaca dan menulis kebanyakan mereka masih mayoritas buta huruf, karena mendirikan sekolah untuk rakyat yang dinamakan sekolah pendidikan elementer itu hanyalah tipudaya mereka saja untuk menjalankan politik etis mereka kepada bangsa Indonesia.⁵

1. System Pendidikan Persekolahan

Dua dasawarsa pertama setelah tahun 1900, pendidikan dasar di hindia belanda mengalami kemajuan yang luar biasa pesatnya. Demikian pesatnya seolah-olah pendidikan selama tiga abad sebelumnya tidak berarti apapun. Pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem umum bagi sekian banyak golongan penduduk yang beranekaragam budayanya, menggunakan secara umum sistem pendidikan, khususnya sistem persekolahan didasarkan kepada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan menurut kelas sosial yang ada dan menurut juga golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu.⁶

⁴ *ibid*,

⁵ *ibid*, hlm, 126

⁶ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *op. cit.*, hlm. 112

Pendidikan sebelum kemerdekaan sampai tahun 1909 terdiri dari beberapa tingkatan dan macam-macam sistem pendidikan yaitu diantaranya:

a. Pendidikan Rendah

Sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa belanda (*westersch lager onderwijs*). Sekolah rendah Eropa (*europesche lagereschool*), yaitu sekolah rendah untuk anak-anak Eropa untuk anak-anak keturunan timur asing atau bumi putra atau tokoh-tokoh terkemuka. Lamanya sekolah selama tujuh tahun, pertama pembangunan sekolah didirikan tahun 1818.⁷

Sekolah bumi putra (*inlandscheschool*) kelas satu (*eersteklasse*) terdiri dari dua macam yaitu sekolah Cina-Belanda yaitu sekolah rendah untuk anak-anak keturunan timur asing, khususnya keturunan Cina, yang pertama didirikan tahun 1908. Lama sekolah tujuh tahun. Sekolah bumiputra-Belanda yaitu sekolah rendah untuk golongan penduduk keturunan Indonesia asli. Pada umumnya disediakan untuk anak-anak dari golongan bangsawan tokoh-tokoh terkemuka atau pegawai-pegawai negeri, lama sekolah tujuh tahun didirikan pada tahun 1914.⁸

b. Pendidikan Lanjut/ Pendidikan Menengah (*middelbaar onderwijs*)

Terdapat satu jenis sekolah lanjutan yang menurut sistem persekolahan Belanda digolongkan dalam sekolah dasar, yaitu sekolah dasar yang diperluas yang disebut juga MULO (*meer*

⁷ Departemen pendidikan loc, cit

⁸ Departemen pendidikan dan kebudayaan op, cit., hlm, 113

uitgebreid lager onderwijs) sekolah tersebut adalah sekolah kelanjutan dari sekolah dasar berbahasa pengantar Belanda. Lama sekolahnya adalah tiga tahun, yang pertama didirikan pada tahun 1914 dan diperuntukkan golongan bumiputra dan timur asing.⁹

Sekolah menengah umum adalah kelanjutan dari mulo berbahasa Belanda, dan diperuntukkan golongan bumiputra dan timur asing, lama sekolah adalah tiga tahun yang pertama didirikan tahun 1915, AMS ini dibagi menjadi dua jurusan yaitu pengetahuan kebudayaan, yang dibagi dua lagi yaitu bagian Al-sastra timur dan bagian sastra klasik barat. Sekolah tinggi warga Negara (*hogore burgerschool*) sekolah menengah kelanjutan dari ELS (*europesschelagere school*) yang disediakan untuk golongan Eropa, bangsawan golongan bumiputra atau tokoh-tokoh terkemuka. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda dan bereorientasi pada Eropa barat khususnya Belanda.¹⁰

C. Pendidikan Kejuruan (*vakonderwijs*)

Sebagai pelaksanaan dari politik etis pemerintah Hindia Belanda banyak mencurahkan perhatian pada bidang pendidikan khususnya pendidikan kejuruan jenis-jenis sekolah kejuruan yang ada ialah:

1. Sekolah pertukangan yaitu sekolah yang memakai bahasa pengantar bahasa daerah yang menerima lulusan bumiputra kelas dua atau selama lima tahun, atau sekolah lanjutan *vervolkschool*

⁹ *ibid*, hlm., 114

¹⁰ *ibid*

dua tahun pertama diberikan pengetahuan dasar dalam dua jurusan yaitu perkayuan dan besi. Sekolah tersebut bertujuan untuk mendidik tukang-tukang yang disebut sekolah pekerja tangan dan sekolah kerajinan tangan yang pertama didirikan tahun 1881.

2. Sekolah pertukangan bahasa pengantar bahasa belanda yang hanya menerima lulusan dari sekolah HIS, HCS dan sekolah peralihan yang bertujuan mendidik dan mencetak mandor, jurusannya antara lain adalah mortar mobil, mesin, listrik, kayu dan piñata batu.
3. Sekolah teknik adalah kelanjutan dari sekolah *Ambachtsschool* berbahasa pengantar Belanda yang lama sekolahnya adalah tiga tahun yang pertama didirikan adalah *Koningin Wilhelmina School* pada tahun 1906 di Jakarta.

D. Pendidikan Tinggi *Hooger Onderwijs*

Baru setelah menginjak dasawarsa kedua abad keduapuluh dikalangan penganjur politik etis terdapat gagasan mengenai pendidikan tinggi bagi golongan bumiputra. Pada tahun 1910 didirikan perkumpulan universitas Indonesia yang bertujuan untuk mendirikan pendidikan tinggi baik melalui pemerintah ataupun swasta. Pendidikan tinggi kedokteran dimulai dari sekolah dokter Jawa yang dimulai dari tahun 1851. Lama belajarnya adalah dua

tahun setelah tamat dari sekolah dasar lima tahun. Bahasa pengantar adalah bahasa melayu.¹³

Pendidikan tinggi hukum dimulai dari sekolah hukum *Rechtsschool* yang didirikan pada tahun 1909. Sekolah ini menerima lulusan ELS termasuk yang telah mengintegrasikan sekolah raja. Lama pendidikan adalah lima tahun dengan kata pengantar Belanda. Dengan sendirinya sekolah ini disediakan untuk anak-anak kaum bangsawan *aristocrat* lama pendidikannya tiga tahun dan menerima lulusan MULO.¹²

Pendidikan sesudah kemerdekaan mulai tahun 1909-1976 terdiri dari beberapa tingkatan dan macam-macam sistem pendidikan yaitu diantaranya:

c. Struktur Sekolah Dasar

Buku induk 1972 mengubah struktur sistem sekolah dasar menjadi 8-4 kini nampaknya sudah gugur. Tapi banyak juga pihak yang berpendapat struktur 6 tahun yang sekarang ini sudah memberikan cukup pengakuan atas kenyataan-kenyataan bahwa umumnya murid-murid tidak menjalani 6 tahun sampai tamat. Kedelapan sekolah pembangunan percobaan dengan SD yang berhubungan dengan masing-masing sedang bereksperimen dengan struktur 5-3-3 tetapi ini belum mempengaruhi kebijakan pemerintah baik di tingkat SD maupun SLTP dan keputusan yang resmi adalah

¹³ *ibid*, hml., 120

¹² *ibid*

pelajaran untuk praktek dan 60 persen jam untuk ilmu pengetahuan alam dan matematika. Sehingga keluaran anak didik akan bisa memenuhi kebutuhan modern.¹⁷

2. System Pendidikan Pesantren

Sistem pendidikan di pesantren bermula jauh sebelum kedatangan agama islam di Indonesia. Pendirian pesantren dimulai dari pengakuan suatu masyarakat kepada keunggulan seseorang yang memiliki ilmu. Karena banyak orang yang ingin memperoleh dan mempelajari ilmu, maka mereka berdatangan kepada tokoh tersebut untuk menimba pengetahuan. Keunggulan tokoh tersebut yang ditekankan adalah ketakwaan kepada yang maha tinggi serta ajaran atau agama yang dianut dan prilakunya. Sesuai dengan alam pikiran masyarakat Indonesia pada umumnya yang menghormati, mengutamakan orang tua dalam arti (*usia*) *primus inter-pares*, dan karena pada umumnya *orang-orang berimu* itu sudah berumur, maka mereka mendapat julukan (*Kiai*) dan khususnya di Jawa Barat disebut (*Ajengan*) yang berarti pemuka.¹⁸

Murid-murid para kiai itu disebut dengan *Santri* dan istilah ini sudah ada sebelum kedatangan agama Islam cumin dalam hal penyebutannya berbeda. Maka dari itu tempat berkumpulnya para santri disebut pesantren. Setelah islam datang dan berkembang, sistem pesantren masih terus berlangsung hingga kini, dengan ciri-ciri yang

¹⁷ ibid, hlm., 238

¹⁸ Departemen pendidikan dan kebudayaan, op, cit, hlm.,232

khas dari sistem pendidikan padepokan yang terdapat pada masyarakat Hindu Jawa. Dapat dimengerti bahwa sebenarnya sistem pesantren dapat bertahan selama belasan abad karena sudah melembaga dalam masyarakat. Ketahanan system ini antara lain terletak pada dayatarik pribadi dari pemimpin pesantren tersebut dan juga memiliki ilmu pengetahuan agama yang mendalam, juga mempunyai sifat-sifat yang mulia, bijaksana, dan semua sifat baik.¹⁹

Mengenai materi pelajaran yang diajarkan selain kitab-kitab *Quran* dan *Hadist*, banyak pula diajarkan tentang *fiqih*, *Hukum* dan *Tasawwuf* untuk menguasai bahan-bahan tersebut, diajarkan pula bahasa *Arab* dari semua segi termasuk *gramatika*, *morfologi*, *fonetika* dan *sintaksis*, jika satu pesantren dapat berkembang maka akan dapat berdiri pesantren-pesantren kecil dibawah naungannya, sehingga akan adanya pesantren induk.

Pola pendidikan ketrampilan merupakan pola yang ditawarkan dan dirintis oleh LP3S (*Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial*) untuk perubahan pesantren dan di kelola Departemen agama, pola ini sekarang telah diikuti oleh 100 lembaga pesantren. Kedua pola pengembangan yang dirintis juga oleh LP3S dengan kerjasama dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta dari dalam maupun luar negeri. Yang ke tiga adalah pola pengembangan sporadic yang ditempuh oleh beberapa pesantren utamasecara sendiri-sendiri, tanpa tema tunggal yang mengikat ke

¹⁹ Departemen pendidikan dan kebudayaan, loc, cit., hlm, 232

semua upaya mereka itu dan dilaksanakan menurut persepsi dan aspirasi masing-masing.²⁰

3. Sistem Pendidikan Madrasah

Lembaga pendidikan madrasah yang didirikan dan dipelopori oleh *Nizam El-Mulk* seorang menteri dari dunia Arab pada abad ke-11, telah mengenalkan sistem pendidikan madrasah dan dikembangkan di Indonesia. Kalau pada sistem pesantren tidak terdapat standart antara satu dengan yang lain, maka pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 pada madrasah-madrasah mulai diperkenalkan pembagian menurut tingkat kemampuan dan prestasi murid, dan kelompok umur serta digunakan metode klasikal, artinya seorang guru mengajar di banyak hadapan murid dalam satu kelas. Sistem dan metode ini sedikit banyak dipengaruhi oleh sistem barat yang digunakan oleh pemerintah Kolonial Belanda dalam sekolah-sekolahnya yang berjenjang dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.²¹

Lembaga pendidikan madrasah berkembang di seluruh tanah air, meskipun sebagian ada yang dipengaruhi oleh madrasah Darul Ulum dan Syaulyah di Makah, namun jelas sistem Barat, pada zaman Kolonial seperti HIS, MULO, AMS, sangat berpengaruh. Walaupun dasar berpendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama Islam, tetapi pelajaran umum diberikan juga. Madrasah memelopori penggunaan huruf latin selain bahasa dan huruf Arab mula-mula sebagai

²⁰ ibid.

²¹ ibid., hlm. 234

pengantar dipergunakan bahasa daerah, kemudian bahasa melayu dan akhirnya bahasa Indonesia. Madrasah yang setingkat dengan sekolah dasar disebut *Madrasah Ibtidaiyah* lama sekolah enam tahun, yang setingkat dengan SMP disebut *Madrasah Tsanawiyah* lama sekolahnya adalah tiga tahun, yang setingkat dengan SMA disebut *Aliyah* lama sekolahnya adalah tiga tahun. Dan untuk perguruan tinggi yang dipergunakan kejuruan pendidikan agama islam yaitu IAIN (*Institut Agama Islam Negri*) dan mempunyai fakultas-fakultas Usuluddin, Syariah, Tarbiyah dan Adab.

Pada umumnya madrasah adalah usaha-usaha swasta yang mendapatkan pengawsan dari departemen agama, madrasah yang memenuhi syarat akan mendapat subsidi dari pemerintah. Sejak tahu 1966 subsidi dari pemerintah telah dihapus, dalam tahun 1958/1959 departemen agama melakukan pembaharuan dalam pendidikan madrasah. Pembaharuan ini diwujudkan dalam bentuk Madrasah Wajib Belajar (MWB). Lama belajar di MWB adalah delapan tahun, dalam pendidikan MWB diutamakan keselarasan tiga hal yaitu: Pengembangan akal (*otak*), pengembangan perasaan dan kemauan (*Hati*), perkembangan ketrampilan (*tangan*). Sedang pelajaran-pelajaran yang diberikan meliputi tiga kelompok yaitu kelompok pelajaran agama, pengetahuan alam, dan kelompok kajian tangan.²²

Kepala Negara sendiri memperhatikan perkembangan madrasah ibtidaiyah swasta antara lain dengan diterbitkannya Inpres no.

²² ibid, hlm, 235

3 tahun 1976 dan no. 3 tahun 1977, isi dari impress tersebut adalah merehabilitasi madrasah madrasah yang ada di Indonesia ini.

B. Perubahan System Pendidikan

Di dalam suatu sistem pendidikan kita akan melihat dasar-dasar tatacara pelaksanaannya. Dalam sejarah pendidikan bangsa Indonesia kita telah mengalami sistem yang dianut oleh Belanda yang dapat kita nyatakan sebagai sistem Kolonial Belanda dengan segala aspek-aspek belandanya. Kemudian disusul dengan sistem pendidikan Jepang yang disesuaikan benar dengan dasar dan tujuan Jepang pada masa itu dan pelaksanaannya berlangsung dengan cara-cara yang diarahkan kepada pencapaian tujuan Jepang. Suatu sistem pendidikan dapat secara konsekuen dilaksanakan dan dapat juga melaksanakan sistem pendidikan yang disesuaikan dengan keadaan.²³ Seperti yang telah dilaksanakan di zaman penjajahan, dengan suasana pelarangan untuk mendirikan pendidikan oleh Belanda sebelum adanya politik etis, sistem pendidikan yang diterapkan adalah sekolah sembunyi-sembunyi.

Di zaman kependudukan Jepang dimana kepada rakyat Indonesia Jepang telah menjanjikan kemerdekaan, dimana nanti rakyat Indonesia dapat menjalankan aspirasinya sebagai warganegara yang merdeka dan melaksanakan pendidikan selayaknya Negara yang sudah merdeka. Pada kependudukan Jepang sangat memperhatikan kebudayaan-kebudayaan yang

²³ Prof. Soegarda poerbakawatja, op, cit., hlm. 125

ada di Indonesia ini. Tapi dengan janji dan perilaku seperti itu Jepang dengan mudah untuk memasukkkan bahasa dan kebudayaannya masuk pada rakyat Indonesia. Dan pada akhirnya tujuan Jepang yang sebenarnya akan terealisasi dengan baik dan mudah.²⁴

Sistem pendidikan di Indonesia sangat jelas tujuannya seperti yang telah ada dalam UUD 1945 dan pada pancasila, yang lebih terincinya terletak pada Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran sekolah yang sangat bersifat nasional. Tatacara pelaksanaannya tidak terlepas daripada ketuhanan yang Maha Esa dan demokrasi.

Demikianlah sistem pendidikan di Indonesia jelas sangat berlainan sifat dan dasarnya dibanding dengan pendidikan Kolonial yang telah dialami dimasa kependudukan Belanda. Pendidikan Indonesia ditujukan kepada rakyat Indonesia dan kepentingan ini bukannya hanyalah kepentingan pemerintah belaka.²⁵

Sistem pendidikan Indonesia berlatarbelakang ilmu jiwa, anak yang telah mempunyai perkembangan kearah dewasa dalam tiga septenia yaitu mengenal dan berpegangan kepada pertumbuhan anak sampai tujuh tahun dari tujuh sampai empatbelas dari empatbelas sampai duapuluhsatu tahun, yang memang masing-masing menunjukkan perkembangan jiwa yang sangat berbeda. Perkembangan tersebut sangat berhubungan dengan intelektual anak tersebut. jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pada masa itu

²⁴ *ibid*, hlm., 126

²⁵ *ibid*, hlm., 127

penentuan tingkat pendidikan hanya menggunakan jenjang umur. Sistem pendidikan di Indonesia mengenal sekolah sebagai berikut:

- Taman kanak-kanak jenjang masa pendidikannya : mulai 4-6 tahun
- Sekolah dasar jenjang masa pendidikannya : mulai 6-12 tahun
- Sekolah menengah jenjang masa pendidikannya : mulai 12-18 tahun
- Perguruan tinggi jenjang masa pendidikannya : mulai 18-....tahun

Pendidikan di Indonesia berkembang mengikuti kebutuhan-kebutuhan riil dan sesuai pula dengan perkembangan dan pembaharuan-pembaharuan di bidang pendidikan dan pengajaran. Badan-badan penelitian pendidikan mulai muncul baik dilingkungan pendidikan tinggi maupun didalam lingkungan instansi-instansi penyelenggaraan pendidikan rendah dan menengah.²⁶

Perubahan istem pendidikan di masa Belanda pada tahun 1622 telah mendirikan sekolah yang dinamakan *Batavia school* yang letaknya di Sunda Betawi dengan jumlah pelajar hanya 92 murid laki-laki dan 45 murid perempuan, dan kemudian pada tahun 1630 telah berdiri sekolah warga Negara *Burger School* sekolah-sekolah tersebut bersifat pendidikan dasar

²⁶ ibid, hlm., 129

dengan tujuan untuk mendidik budi pekerti. Demikian pula sekolah-sekolah yang berada di wilayah keberadaan VOC di Indonesia bagian timur bersifat pendidikan dasar dan bercorak agama.²⁷

Pada abad ke-17 bahasa latin merupakan bahasa ilmiah bagi orang Eropa. Oleh karena itu timbul gagasan untuk mendirikan sekolah latin di Jakarta. Sistem persekolahan dimulai dengan cara numpang tinggal *In de kost* di rumah seorang pendeta. Dengan pemberian sejumlah biaya menumpang 12 murid keturunan belanda dan indo, pada tahun 1642 mulai diajar bahasa latin, jenis sekolah ini sempat berkembang sebentar, tapi ditahun 1651 sudah mulai menyusut sehingga pada akhirnya ditutup pada tahun 1656. dan pada tahun 1666 sekolah latin dibuka lagi tetapi hanya mampu bertahan empat tahun kemudian ditutup lagi.²⁸

Van imhoff telah mendirikan sekolahan akademi pelayaran *Academie Der Marine* dengan maksud untuk melatih dan mendidik calon perwira pelayaran. Lembaga yang didirikan pada tahun 1743 ini mengalami nasib yang sama dengan sekolahan latin, sekolahan akademik ini ditutup oleh pengganti Van imhoff yaitu gubernur Jendral Mossel akademik tersebut ditutup pada tahun 1755 dengan alasan yang sama juga, dengan alasan jumlah lulusannya hanya sedikit.²⁹

Sistem pendidikan dimasa pemerintahan Hindia Belanda, pada waktu Belanda berkuasa kembali di Indonesia pada tahun 1816 setelah

²⁷ departemen pendidikan dan kebudayaan, op, cit., hlm. 81

²⁸ ibid

²⁹ departemen pendidikan, loc. Cit, hlm., 83

dikuasai oleh Inggris, tidak ada satupun sekolah negeri. Sekolah yang pertama dibukan untuk anak-anak orang Eropa ialah sekolah di Betawi, yang dibuka pada tanggal 24 Februari 1817. Sekolah tersebut mencontoh sekolah dasar yang ada di negeri Belanda. Pada tahun 1820 jenis sekolah ini dikembangkan menjadi 7 sekolah, yaitu 2 di Betawi *Weltevreden* dan *Molenvliet* di Cirebon, Semarang, Surakarta, Surabaya dan Gresik. Pada tahun 1833 jumlah sekolah ditingkatkan menjadi 19 tahun 1895 menjadi 159 sekolah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia khususnya Jawa. Dan pada tahun 1902 jumlah sekolah menjadi 173. Dengan jelas dapat dilihat bahwa sejak pertengahan abad ke-19 sebagian besar penduduk golongan Eropa dapat menikmati pendidikan dasar.³⁰

³⁰ departemen pendidikan, loc.cit, hlm., 91



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
SUNAN GIRI BOJONEGORO**

BAB III

KEANERAGAMAN PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN SAMPAI KEMERDEKAAN

Keaneragaman pendidikan di Indonesia pada saat penjajahan dan sesudah penjajahan sangatlah beragam masalah pendidikan dari mulai pendidikan ketrampilan sampai pendidikan pelayaran dan pengetahuan ilmu umum. Pendidikan pendidikan yang didirikan oleh para penjajah merupakan pendidikan yang menguntungkan pihak penjajah, karena sekolah-sekolah yang didirikan hanyalah untuk golongan mereka sendiri dan sebagian kecil adalah anak orang-orang terkemuka.

Di dalam bab tiga ini akan dipaparkan tentang macam-macam sekolah pendidikan di Indonesia yang pada saat itu berada di dalam suasana penjajahan Kolonial sampai dengan saat ini. Karena banyak warisan-warisan yang ditinggalkan penjajah pada saat itu yang berhubungan dengan pendidikan sekarang ini, termasuk salah satunya adalah gedung-gedung sekolah dan system-sistem pendidikan yang digunakan sesudah kemerdekaan.

A. Pendidikan Orang Dewasa

Dalam usaha pemerintah pendidikan orang dewasa ini kita kenal sebagai pendidikan masyarakat. Untuk menyelenggarakan pendidikan masyarakat ini dibentuk suatu kelompok pendidikan masyarakat dalam scope dan organisasi untuk merubah kebijaksanaan pemerintah yang

berubah-ubah. Pada permulaan kemerdekaan terasa dengan kuat keinginan bangsa Indonesia untuk memiliki suatu masyarakat dan suatu Negara yang makmur dan bebas dari penjajahan. Bangsa Indonesia pada waktu itu sangat menginginkan masyarakat yang pandai dan hidup teratur, bisa melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara yang merdeka. Dan bisa mengejar cita-cita untuk masa depan terutama tentang pendidikan.⁴

Dalam konferensi pendidikan masyarakat bulan Agustus 1955, dinyatakan hendaknya pendidikan masyarakat:

*Mengusahakan/ memelihara hubungan baik dan sehat dengan masyarakat dan instansi/ badan-badan yang mempunyai tugas sama/ sejenis dalam pembinaan dan pembangunan masyarakat atas dasar kepercayaan terhadap pejabat-pejabat dan instansi-instansi pendidikan masyarakat.*⁵

Dalam rapat pendidikan masyarakat pada tanggal 25-27 April 1956 disebutkan bahwa hendaknya pendidikan masyarakat terutama bersifat pembangunan masyarakat desa dengan memakai dasar-dasar yang nasional serta membawa bangsa Indonesia kepada nilai-nilai hidup yang selaras dengan kehidupan bangsa Indonesia yang sebenarnya.

Dalam usaha-usaha membangun pendidikan masyarakat tidak seluruhnya seperti yang dipaparkan diatas, instansi-instansi pendidikan masyarakat mempunyai kewajiban terkait surat keputusan Menteri P.P. dan

⁴ Prof. Soegarda Poerbakawatja (1970) pendidikan dalam alam Indonesia merdeka. P. T Gunung Agung, Jakarta hlm. 153

⁵ ibid

K. tanggal 15 februari 1915 no. 4223/Kab. Pasal 17.⁶ yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Merencanakan, memimpin, menggiatkan dan mengawasi pemberantasan buta huruf.
- b. Merencanakan, memimpin, mengingatkan, dan mengawasi pengetahuan umum (KPU).
- c. Mengusahakan buku-buku untuk dan mengisi perpustakaan rakyat.
- d. Mengikuti dan membantu perkembangan gerakan pemuda.
- e. Mengusahakan buku-buku pimpinan dan pelajaran untuk pemberantasan buta huruf, serta buku-buku dan majalah-majalah untuk memelihara kepandaian membaca dan menulis.
- f. Memimpin dan mengawasi pendidikan jasmani di luar sekolah.
- g. Menyelenggarakan kursus-kursus kader untuk pendidikan masyarakat.
- h. Memajukan dan membantu gerakan pemuda.
- i. Membantu inisiatif masyarakat untuk kemajuan kaum wanita.

Ketentuan-ketentuan itu jelas tidak cukup memberi kesempatan kepada pendidikan masyarakat untuk menjadi tenaga penggerak, pembimbing dan penyusun menuju ke masyarakat baru yang menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Pendidikan masyarakat telah menyelenggarakan usaha-usaha *interdepartementaal* yang telah mendidik tenaga-tenaga untuk ikut serta dalam usaha-usaha pembangunan masyarakat desa, semuanya usaha-usaha yang wajar, meskipun tampaknya sangat

⁶ *ibid*, hlm., 155

meragukan tetapi sebenarnya pendidikan masyarakat menempati peranan pemimpin pendidikan.⁷

Keraguan-keraguan dalam pendidikan masyarakat dapat kita lihat dalam tugas resmi yang tercantum dalam pasal 17 s.p Menteri P.P. dan K. tanggal 15 Februari 1951 No. 4223/Kab, yang dimaksud ragu-ragu adalah ragu-ragu untuk mendidik tenaganya untuk belajar mandiri dan mandiri. Pendidikan masyarakat hendaknya dapat menghadapi masyarakat sebagai sesuatu keseluruhan dengan segala bentuk, dan tidak lagi sebagai kelompok dari bagian yang masih menggantung kepada pemerintah dan petunjuk dari atas.⁸

Dengan sistem yang menunjukkan cara-cara modern dan sistematis, seperti yang ada di daerah percobaan Kebon Jeruk, pendidikan masyarakat ini akan sanggup untuk menghadapi dan membangun masyarakat dengan secara luas, asal diadakannya:

- a. Perubahan tugasnya sesuai dengan perkembangan yang sudah dicapai.
- b. Perbaikan mutu pendidikan.
- c. Ketentuan tempat dan peranannya dalam hubungan *interdepartemental*.
- d. Ketentuan tentang kerja sama dengan instansi-instansi di dalam dan di luar Kem.P.P dan K.
- e. Ketentuan tentang peranannya dalam pendidikan nasional.

Dengan ketentuan-ketentuan itu pendidikan masyarakat akan memasuki priode baru dimana ia dengan positif dan pesat akan dapat mengembangkan usaha-usaha untuk membangun suatu masyarakat

⁷ ibid

⁸ ibid, hlm., 156

Indonesia yang sehat lahir batin sebagai satu dasar tokoh untuk kemajuan bangsa dan Negara. Dengan adanya konsep sistem yang dilakukan oleh pendidikan masyarakat akan menghilangkan keraguan pemerintah untuk lebih tegas dalam menilai (*evaluation*) pada prestasi dan instansi-instansi pendidikan masyarakat.⁹

Dalam perkembangan selanjutnya kita melihat bahwa pada suatu saat pemerintah membentuk suatu departemen pembangunan msuarakat desa dan kemudian dengan departemen ini pembangunan masyarakat desa dimasukkan dalam departemen dalam negri. Dengan demikian status pendidikan masyarakat yang dalam bentuk semula ditekan dengan tugas-tugas dari pemerintah sekarang sudah menjadi mandiri dikarenakan perkembangan-perkembangan yang sudah dialami.¹⁰

B. Pendidikan Luar Biasa

Di zaman penjajahan pendidikan luar biasa diselenggarakan oleh pihak swasta. Sehingga kesan yang diperoleh adalah, bahwa pendidikan luar biasa merupakan hanya sekedar tidak lebih dari usaha sosial yang dilakukan masyarakat. Memang dari segi sosial tampak jelas dan biasanya usaha-usaha demikian itu tergantung hidup matinya dari kebaikan serta kelayakan para sosoawan dan hartawan yang memberi sumbangannya. Lembaga-lembaga pendidikan luar biasa itu adalah:

- a. *Blinden-instituut* terletak di Bandug (lembaga tuna netra).
- b. *Het doofstommen-instituut* terletak di Bandung (lembaga tuna rungu dan tuna wicara).

⁹ ibid

¹⁰ ibid

- c. *Het doofstommen-instituut* terletak di Wonosobo.
- d. *Het Zwakzinnigen-Gesticht* terletak di Temanggung (lembaga lemah ingatan).
- e. *School voor zwakzinnigen* terletak di Bandung.

Di Negara Indonesia yang merdeka ini sangat menaruh perhatian terhadap nasib-nasib anak tuna ini dan menerima sebagai suatu kewajiban mutlak untuk memperlakukan mereka sama dengan saudara-saudara mereka yang normal.¹¹

Indonesia ingin memberi harapan kepada mereka untuk terus maju dan melaksanakan pembelajaran selayaknya saudara-saudara mereka yang normal, yang pada akhirnya mereka bisa hidup dan berpenghidupan yang mempunyai kepuasan dan kebahagiaan.

Dalam undang undang republik Indonesia telah di cantumkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur nasib anak-anak tuna tersebut, yang di jelaskan sebagai berikut:

Pertama : Undang-undang dasar 1945 Bab XIII pasal 31 ayat 1 Mengatakan tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran yang selayaknya. Bab XIV tentang kesejahteraan sosial pada pasal 34 memberi tempat pada fakir miskin dan *anak-anak* terlantar dipelihara oleh Negara,dan anak-anak yang tuna dapat digolongkan kepada anak-anak terlantar, karena pada umumnya orang tua tidak bisa berbuat banyak terhadap mereka.¹²

¹¹ *ibid*, hlm., 157

¹² *ibid*

Kedua : Undang-undang No.4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah memuat pasal-pasal yang berhubungan dengan pendidikan luar biasa yaitu

- a. Bab V pasal 6 ayat 2 berbunyi, pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan.
- b. Bab V ayat 7 ayat 5 menyatakan, pendidikan dan pengajaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rohaninya, supaya mereka dapat memiliki kehidupan lahir batin yang layak.
- c. Bab VII tentang kewajiban Pelajar pasal 10 ayat 1 menyebutkan, semua anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya.
- d. Bab XIV tentang uang pembayaran sekolah dan alat-alat belajar pasal 22 yang berbunyi, di sekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah luar biasa tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat pelajaran. Selanjutnya pasal 23 menyatakan, disemua sekolah negeri kecuali sekolah rendah dan luar biasa, diharuskan murid-murid membayar uang sekolah yang ditetapkan menurut kekuatan orangtua.
- e. Penjelasan ayat 7 pasal 5 menerangkan orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani dan rohani ialah orang-orang yang

buta, tuli, bisu, imbeciel, atau yang mempunyai cacat jasmani atau rohani lainnya, untuk keadilan sosial mereka itu dipelihara dan di didik demikian, sehingga ada kesempatan dan kemungkinan bagi mereka untuk memiliki kehidupan lahir maupun batin yang selayaknya sebagai manusia normal.¹³

Usaha-usaha pemerintah untuk menangani pendidikan luar biasa ini adalah, pertama-tama telah dibentuk suatu instansi dalam kelompok pengajaran Kem. P.P. dan K yang khusus di serahi tugas menghadapi masalah pendidikan bagi anak-anak tuna. Instansi ini adalah urusan pendidikan luar biasa dan bertugas mengatur, mengurus, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan luar biasa di Indonesia *surat keputusan P.P. dan K. No.4483/Kab. Tanggal 9-8-1953.*¹⁴

Suatu usaha pencatatan penelitian yang dilakukan kelompok pengajaran luar biasa mengenai adanya anak-anak tuna di daerah-daerah, terbentur kepada sifat masyarakat umumnya yang menunjukkan rasa malu memiliki anak yang cacat dan yang juga tidak mengetahui kemungkinan hidup bahagia selayaknya orang normal. Data-data dari bahan penelitian tahun 1952 yang terdapat di Inggris:

- a. Sebanyak 0,3 % anak yang mengalami cacat buta
- b. Sebanyak 0,8 % anak yang mengalami cacat bisu dan tuli
- c. Sebanyak 6,- % anak yang mengalami cacat tubuh
- d. Sebanyak 2¹/₂ % anak yang mengalami cacat lemah ingatan

¹³ *ibid*, hlm., 158

¹⁴ *ibid*

Jika kita menggunakan bahan-bahan itu maka atas 100 juta jiwa penduduk Indonesia dapat di kira-kirakan ada:

- Sebanyak 300.000 anak buta
- Sebanyak 800.000 anak bisu tuli
- Sebanyak 6000.000 anak cacat tubuh
- Sebanyak 2.500.000 anak lemah ingatan

Dan perlu dicatat, bahwa di Eropa dan Amerika angka anak yang baru lahir sedikit kemungkinan mengalami kematian, sedangkan di Indonesia angka kematian kelahiran anak sangat banyak sekali, sehingga angka-angka di atas kemungkinan terlalu tinggi.¹⁵

Berikut ini adalah daftar usaha-usaha pemerintah di bidang pendidikan luarbiasa yang dapat dicatat antara lain:

1. Pendidikan untuk tuna netra di Jakarta oleh yayasan pendidikan kesejahteraan anak buta.
2. Pendidikan untuk anak-anak tuna rungu didirikan oleh yayasan penyantun telinga.
3. Pendidikan untuk anak-anak terbelakang dalam pekerjaan sekolah oleh yayasan Asih Budi terletak di *pegangsaan timur 23 di Jakarta*.
4. Pendidikan untuk anak-anak tuna netra di Bandung oleh perkumpulan untuk memperbaiki nasib orangbuta terletak di *Jalan pajajaran 52*.

¹⁵ ibid, hlm., 160

5. Pendidikan untuk anak-anak tuli bisu didirikan oleh perkumpulan pendidikan luarbiasa. Dengan tujuan memberi pelajaran bagi anak-anak tuli bisu. Terletak di *Cijendo 2a Bandung*.
6. Pendidikan untuk anak-anak lemah ingatan di Bandung.
7. Pendidikan untuk anak-anak pria tuna rungu terletak di Wonosobo dibentuk oleh jajaran karya bakti.
8. Pendidikan untuk anak-anak wanita tuna rungu dibentuk oleh jajaran lembaga anak bisu terletak di Wonosobo.
9. Pendidikan anak-anak tuna netra di Temanggung dibentuk oleh jajaran kesehatan anak-anak tuna netra Indradaja.
10. Pendidikan anak-anak tuna netra dibentuk oleh lembaga pendidikan anak tuna tempat di Klaten.
11. Pendidikan untuk anak-anak tuna netra di Bendo gantungan bertempat di Klaten.
12. Pendidikan untuk anak cacat tubuh oleh yayasan pemeliharaan anak (J.P.A.T) di Surakarta dengan cabangnya di Semarang dan Surabaya.
13. Pendidikan untuk anak terbelakang dan lemah ingatan di Madiun oleh yayasan Budi Juwono lembaga pendidikan anak-anak luar biasa (LPALB).
14. Pendidikan untuk anak-anak tuna netra dan tuli bisu di Surabaya oleh yayasan pendidikan anak tuli bisa (PPABI).
15. Pendidikan untuk anak tuna netra di Surabaya Oleh yayasan anak-anak buta.

16. Pendidikan untuk anak-anak tuna netra di Denpasar oleh yayasan pendidikan anak-anak buta.
17. Pendidikan anak-anak tuna rungu di Sisingaraja oleh pendidikan orang-orang tuna.
18. pendidikan untuk anak-anak terbelakang di makasar oleh fihak swasta.
19. Pendidikan untuk anak-anak tuna rungu di Pontianak oleh perkumpulan pengajaran luar biasa.
20. Pendidikan untuk anak-anak tuna oleh pihak swasta di selenggarakan di Aceh, Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi.
21. Pendidikan untuk anak-anak nakal yang diselenggarakan oleh departemen kehakiman di Pra juwana (pro juventute).

Dalam rangka kewajiban belajar bagi anak yang termasuk golongan-golongan tersebut diatas perlu juga dipikirkan cara-cara dan peraturan yang khusus untuk melibatkan mereka dalam kewajiban belajar, terutama perlu mendapat perhatian khusus anak yang sama sekali tidak dapat menerima pendidikan biasa.¹⁶

C. Pendidikan Guru

Sulit untuk betul-betul bisa memahami masalah pendidikan guru di Indonesia tanpa mengenal sejarahnya, sebelum dua dasawarsa sebelum PPNP dibentuk, lembaga pendidikan guru di Indonesia telah mengalami sejarah yang mempengaruhi keadaannya saat ini. Awal tahun 1950

¹⁶ ibid, hlm., 164

departemen pendidikan dan kebudayaan dibawah seorang sekertaris jendral yang tegas telah munyusun suatu rencana menyeluruh mengenai penampungan anak-anak yang mau sekolah dan sekaligus juga untuk meningkatkan profesi mengajar. Rencana itu menetapkan suatu standart yang ideal untuk bisa menjadi guru, jauh diatas persyaratan yang dimiliki pada waktu itu, pendidikan SLTA tiga tahun termasuk pendidikan guru untuk guru SD, masing-masing sarjana muda tiga tahun dan sarjana pendidikan lima tahun bagu SLTP dan SLTA . rencana itu kemudian melahirkan lembaga-lembaga pendidikan guru yang dalam perkembangan selanjutnya berubah menjadi SPG dan IKIP sekarang.¹⁷

Usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi guru-guru yang kurang berpengalaman, pemerintah mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk guru-guru dalam beberapa tingkat yaitu:

a. Pendidikan guru SD

Sejarah pendidikan guru SD dan lembaga pendidikan guru sekolah lanjutan sangat berbeda, karena itu harus dibicarakan terpisah. Waktu itu pemerintah telah menetapkan akan melaksanakan wajib belajar untuk pendidikan dasar tahun 1961-1962, dan bisa dimengerti apa yang melatarbelakangi pembentukan lembaga pendidikan guru sekolah dasar yang diumumkan oleh sekertaris jendralwaktu itu, yang berbunyi, “ *untuk menghasilkan tenaga guru sebanyak mungkin dengan*

¹⁷ C.E. Beeby (1979), pendidikan di Indonesia. New Zealand Council for Educational Research Oxford Unifersity press, Wellington. hlm.128

singkat dengan biayaserendah-rendahnya berdasarkan standart pendidikan umum” lembaga utama yang sifatnya sementara bagi calon guru sekolah dasar adalah SGB Sekolah Guru B.¹⁸

Untuk guru-guru khusus pedesaan kursus diadakan secara tertulis baik untuk guru perseorangan atau kelompok dan fungsinya untuk memungkinkan masing-masing guru berusaha sendiri menyempurnakan kemampuannya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. oleh banyak guru yang tidak bisa menyelesaikan belajar dengan cara darurat itu, kebanyakan putus tengah jalan. Bagaimanapun mutu hasilnya, rencana mencetak tenaga guru lewat pendidikan darurat tersebut telah menghasilkan jumlah guru demikian banyak sehingga pemerintah merasa aman untuk menghapuskan SGB di tahun 1961 dan hanya mengandalkan pada guru-guru yang berijazah SGA atau yang sederajat.¹⁹

Mentri pendidikan Priyono menciptakan dan menyesuaikan sejumlah lembaga untuk mengubah kurikulum SPG, bereksperimen dengan metode mengajar yang sesuai dengan tujuan sekolah yang lebih luas, mendirikan pilot dengan metode baru pendidikan guru dan membantu menyebarkan ide-ide baru itu kedalam sistem pendidikan. Rencana ini memang imajinatif, tapi apabila dibaca sekarang akan terdapat sifat realistik karena rencana itu tidak memperhitungkan terbatasnya dana, fasilitas guru, tenaga-tenaga pendidik, tenaga administrasi yang sangat menghabiskan dana yang sangat cukup besar.

¹⁸ *ibid*, hlm., 130

¹⁹ *ibid*

Ditahun 1968 SPG kembali memasuki priode pahit, yaitu ketika pemerintah melaksanakan penertiban jumlah pegawai negeri yang begitu besar yang diwarisi dari zaman Soekarno, membekukan pengangkatan baru pegawai negeri sampai waktu tertentu begitu pengangguran mencapai jumlah yang wajar, untuk kantor-kantor pemerintah termasuk di departemen pendidikan dan kebudayaan hal ini dapat dibenarkan, tapi bagi sekolah sekolah negeri hal ini merupakan pukulan yang berat karena disini jumlah guru ditentukan oleh besarnya jumlah murid sementara dilain pihak tekanan pihak orangtua menyebabkan terjadinya meningkatnya jumlah sekolah tanpa menghiraukan pembatasan pemerintah itu.

Kedati ada larangan pengangkatan baru lembaga pendidikan guru terus mencetak tamatan-tamatan baru, dalam tahun 1968-1971 kira-kira 80.000 orang lulus dari sekolah pendidikan guru. Baik negeri maupun swasta. Seperti dapat diduga hal ini membawa pengaruh yang serius terhadap calon-calon guru, yang masih menuntut pelajaran di lembaga pendidikan guru, apalagi dari mereka itu hannya sepertiga mendapat beasiswa yang ditahun 1950 diberikan secara bebas. Staf SPG juga tidak lepas dari penyakit diatas. Setelah dua dekade murid, mereka dapat dimaafkan untuk meninggalkan dinas, seperti yang dikatakan Winarno dan Tomas, atau tetap menunggu datangnya angin perubahan menghalau mereka. Perubahan dalam pendidikan guru dipusatkan pada segi kuantitatif ditahun 1950 dan gagalnya rencana perubahan mutu ditahun 1960 kurang sekali memberikan dasar ideal bagi kampanye baru

untuk meningkatkan mutu tahun 1970 diperlukan pemikiran khusus, kepandaian administrasi serta pengabdian konsep-konsep pendidikan baru guna menciptakan suasana yang kena bagi pembaharuan system yang telah dikenal dengan kekecewaan.²⁰

b. Pendidikan Guru Sekolah Lanjut

Ditahun 1950 pendidikan guru sekolah lanjut, dalam teori dan praktek pedagogi. Dimulai dari nol. Sama halnya dengan negri-negri lain, Indonesia pada mulanya mengambil guru-guru sekolah lanjutan dari jurusan umum di universitas, agaknya dengan asumsi bahwa yang esensial adalah kadar pengetahuan mengenai mata pelajaran yng diajarkan sedang metode mengajar bisa dipelajari dalam praktek. Ini adalah sikap yang, dimana-mana di dunia ini, telah membuat pendidikan menengah enggan terhadap perubahan. Tetapi jumlah lulusan universitas sama sekali tidak mencukupi dan seperti halnya dalam pendidikan dasar, kemudian didirikan lembaga pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (GSLP), untuk mencetak tenaga-tenaga pengajar SLTP, PGSLP memberi pendidikan setahun kepada murid-murid lulusan SLTA, dan juga memberikan kursus dan penataran kepada guru-guru yang sudah mengajar.²¹

Tahun 1954 terlihat perkembangan yang sama sekali baru sifatnya dengan ditetapkannya lembaga baru yang lebih tinggi untuk mencetak guru-guru dengan pemberian gelar sarjana muda dan sarjana, dua tahun kemudian kemudian lembaga baru ini dicangkokkan kedalam

²⁰ ibid, hlm,. 133

²¹ ibid, hlm,. 134

universitas sebagai fakultas pendidikan dengan nama fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Ditahun 1964 kebanyakan FKIP melepaskan dirinya dari universitas dan ditetapkan sebagai institute terpisah, yaitu IKIP, tapi ia segera menjadikan dirinya bersifat murni akademis sehingga perhatiannya lebih pada isi disiplin dan bukannya pada metode pengajarannya.²² Walaupun mata pelajaran dari yang setingkat dengan *college* tadi dimasukkan juga ke FKIP dan IKIP tapi mata pelajaran itu tidak berkembang dalam suasana yang dikehendaki. Alasan yang dikemukakan Winarno dan Thomas adalah bahwa anggota-anggota fakultas menganggap ijazah tingkat hanya dapat diperoleh pada kursus-kursus reguler.

Hasil PPNP sekurang-kurangnya menunjukkan arah umum yang harus diikuti lembaga pendidikan guru yaitu:

1. Mutu dan pendidikan staf SPG perlu diperbaiki, kemiskinan isolasi intelektual, dan setruktural kewenangan dari system pendidikan membuat lembaga ini terpencil dan tidak punya inisiatif yang diperlukan. Semakin banyak mengikuti pembaharuan-pembaharuan pendidikan semakin parah keadaannya.
2. IKIP harus berinteraksi dan berorientasi ke sekolah menengah dan bukan ke universitas. Di masa lalu terutama berperan sebagai lembaga yang menggodok calon-calon guru, tapi kurang sekali menghiraukan lulusannya yang keluar dari lembaga itu. Ia

²² ibid

- hendaknya mengetahui keadaan di sekolah, terutama di sekolah-sekolah terpencil.
3. Seperti yang sudah diketahui IKIP, SPG harus bekerjasama dengan instansi pendidikan dengan kemungkinan pertukaran staf diantara ketiganya.
 4. Perlu dibuat perbedaan yang jelas antar penataran yang dimaksudkan membantu guru meningkatkan nilai masa dinasnya, dan karena itu mendapat gaji yang lebih baik atau dipindahkan ke sekolah yang lebih tinggi.
 5. Pendidikan, baik yang *in* maupun yang *pre-service*, di SPG maupun IKIP hendaknya ada hubungan yang lebih erat daripada diwaktu lalu dengan kebijaksanaan baru.
 6. Hendaknya ditemukan cara untuk memberikan imbalan yang lebih baik bagi pengajar yang spesialis di sekolah lanjutan, khususnya di daerah terpencil.

D. Pendidikan Swasta

Pendidikan swasta dalam arti pendidikan yang tidak diselenggarakan oleh pemerintah telah ada di segala zaman. Asal mula dari pendidikan swasta bermacam-macam. Tapi yang terang ialah, bahwa pendidikan yang didirikan oleh suatu pemerintah tidak selalu memenuhi kebutuhan semua golongan dari masyarakat, biasanya pendidikan pemerintah hanya dapat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang berupa intelektualnya saja. Didalam pemerintahan colonial sifat pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah *neutral* yang berarti tidak mencampuri urusan-urusan

mengenai agama. Dengan sendirinya orang-orang yang menginginkan ilmu pendidikan agama bagi anak-anaknya mengusahakan usaha khusus, yaitu mendirikan suatu sekolah yang dimana ilmu-ilmu agama dapat diajarkan dan dikhususkan.²³

Demikianlah dalam zaman penjajahan Belanda ada sekolah-sekolah swasta dari golongan Katolik, Zeding dan golongan Islam yang sejak zaman dahulu yang menyelenggarakan pendidikannya sendiri di madrasah-madrasah tidak masuk dalam perhatian pemerintah Belanda, dalam arti bahwa pemerintahan Belanda tidak mau ikut campur dalam pendidikan ini dan melaksanakan kebijaksanaan yang disebut (*politik van onthouding*) atau politik tidak campur.

Dalam laporan panitia penyelidik pengajaran tahun 1946 yang menunjukkan sikap bangsa Indonesia secara wajar terhadap pendidikan swasta dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Pemerintah berkewajiban mendirikan sekolah sebanyak-banyaknya.
2. Disamping pemerintah, dapat diselenggarakan sekolah-sekolah partikular.
3. Pendidikan sekolah partikular itu tidak boleh bersifat persaingan.
4. Pendirian sekolah partikular itu bersifat memperlengkap apa yang kurang lengkap.
5. Yang mendirikan sekolah-sekolah partikular itu hendaknya rombongan warga negara yang yang mewujudkan badan hukum dan bertanggung jawab atas segala urusan sekolah-sekolah itu.

²³ Prof. soegarda poerbakawatja, loc, cit., hlm., 206

6. Disamping pelajaran-pelajaran yang seharusnya minimum diadakan, badan hukum itu dapat memberikan pendidikan yang khusus.
7. Pemerintah berkewajiban memberikan bantuan-bantuan kepada sekolah partikular, berupa biaya dan alat-alat pelajaran.
8. Dalam keadaan yang istimewa dapat juga dibantukan guru-guru pada sekolah partikular.
9. Pemerintah berkewajiban mengirim juru pemeriksa sekolah-sekolah partikular.
10. Sekolah partikular tunduk kepada sekalian peraturan yang diadakan oleh pemerintah.
11. Pengurus sekolah partikular berkewajiban setiap kali mengirim laporan kepada pemerintah mengenai keuangan.
12. Pemerintah mempersamakan jarga ijazah sekolah partikular dengan sekolah negridan memberikan hak kepada murid-murid sekolah partikular untuk bisa pindah ke sekolahan negeri.

Tidak semua sekolah partikular mendapat bantuan dari pemerintah.

Ada yang karena sekolah-sekolah itu kurang memenuhi syarat-syarat untuk itu, tetapi juga mungkin sekolah-sekolah swasta itu tidak menghendaki bantuan dari pemerintah. Hal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarat minimal berhubungan mengenai soal-soal akademis disamping syarat politis tetap dari pemerintah tidak berarti, bahwa lulusan dari sekolah-sekolah yang demikian itu tidak boleh pindah atau melanjutkan ke sekolah-sekolah pemerintah.²⁴

²⁴ *ibid*, hlm. 109

Dalam masa penjajahan Belanda ada suatu ordonansi untuk sekolah-sekolah liar, yaitu sekolah-sekolah yang tidak memenuhi syarat-syarat pemerintah dalam tujuan, rencana pembelajaran dan cara-cara penyelenggaraannya. Perguruan Nasional Taman Siswa pada zaman itu termasuk sekolah liar dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam *wilde scholen ordonnantie* yang mengenai guru-guru dan lain-lain, yang pada dasarnya menghalang-halangi yang mempersulit hidup para guru.²⁵

Melihat masalah diatas maka masyarakat Indonesia yang telah merdeka ini yang merasa ikut tanggungjawab dan melaksanakan perubahan yang khususnya melaksanakan perubahan pada pemerintah yang berhubungan dengan masalah ini dan harus mempertanggung jawabkan tiap langkahnya dalam menentukan peraturan. Sehingga pekerjaan para guru dapat berjalan dengan lancar.²⁶

Mengingat keuntungan dalam pihak swasta atau pihak masyarakat pada umumnya, perlu mendapat perhatian adanya kemungkinan mempergunakan kenyataan ini untuk mempercepat kemajuan pembangunan, yaitu untuk ikut secara basar-besaran dalam pembangunan.

²⁵ ibid.

²⁶ ibid.



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
SUNAN GIRI BOJONEGORO**

BAB IV

HAL-HAL YANG MEMBANTU PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Dalam taraf pembangunan pendidikan di Indonesia banyak hal-hal yang membantu dalam perkembangan pendidikan ini. Diantaranya dalam bidang pembangunan, bidang Sosial, dan dalam bidang sarana-prasarana, semua bidang tersebut mempunyai banyak peranan yang sangat banyak membantu dalam perkembangan pendidikan di Indonesia ini. Dalam bab IV ini akan membahas hal-hal yang membantu perkembangan pendidikan, yaitu diantaranya .

A. Dari bidang pembangunan

Pembangunan gedung-gedung sekolah bermacam-macam keadaannya, dari yang terbagus hingga yang terburuk. Menurut hasil survei hanya 50 % dari gedung-gedung itu yang bersifat permanen, ruang kelas umumnya terlindung dari cuaca dan terik matahari. Namun demikian 10-15 persen dari gedung-gedung itu sudah sangat memerlukan perbaikan dan sangat tidak memenuhi syarat kesehatan, sedang halaman bermainnya keadaannya sangat memprihatinkan tidak selayaknya halaman bermain anak sekolah.²⁷

²⁷ C.E .Beeby (1979), pendidikan di Indonesia. New Zealand Council for Educational Researsch Oxford Unifersity press, Wellington. hlm. 51

Gedung-gedung sekolah dasar telah kita lihat bahwa masyarakat sendiri berbagai tempat bersedia untuk mendirikannya dari dana yang dapat di kumpulkan terutama di kalangan mereka yang langsung berkepentingan. Jika kita hitung berapa gedung sekolah dasar harus didirikan, maka akan kita lihat, bahwa benar-benar bantuan masyarakat atas dasar gotong royong tidak dapat kita kesampingkan. Pemerintah tidak akan dapat dalam waktu singkat menjadikan keuangan dan bahan-bahannya dan untuk pembangunannya jelas diperlakukan suatu jangka waktu yang agak lama. Pada dewasa ini dikira-kirakan jumlah anak wajib sekolah dari 100 juta penduduk ada 15 juta orang. Secara kasar kita misalkan tiap guru mengajar 50 dan tiap sekolah mempunyai 6 ruang, maka akan diperlukan 15.000.000 : 6 x 50 gedung sekolah, atau 50.000 buah gedung sekolah.²⁸

Gedung yang ada sebageian besar sudah tua, jumlah baru yang relatif sedikit sekali, sehingga ber puluh-puluh ribu gedung sekolah harus didirikan. perhatikan kapasitas keuangan dan kapasitas kerja kita, maka kita akan mengetahui berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Satu faktor penting yang harus diingat, bahwa bangsa Indonesia menghadapi pembangunan disemua bidang bahwa pembangunan di bidang pendidikan rendah termasuk tugas propinsi yang pada umumnya masih pada taraf penjurusan dan perkembangan.²⁹

Jika dalam menghadapi pembangunan gedung-gedung sekolah dasar kita sebageian terbesar masih dapat mempergunakan bahan-bahan dalam negri berupa kayu, batubata, genteng, dalam menghadapi sekolah-sekolah

²⁸ Prof. soegarda poerbakawatja (1970) pendidikan dalam alam Indonesia merdeka. P.T gunung agung, Jakarta hlm. 287

²⁹ ibid.

lanjutan sebaliknya banyak bahan-bahan yang harus kita datangkan dari luar negeri, lebih-lebih kalau diperlukannya laboratorium, museum, perpustakaan dan sebagainya, sehingga pelaksanaannya lebih sulit, mahal dan memakan waktu yang lebih lama.³⁰

Jika untuk membangun sekolah-sekolah dasar kita dapat mengharapkan bantuan masyarakat, setidaknya-tidaknya dalam mendapatkan tanah, maka gedung-gedung sekolah lanjutan dantinggi yang termasuk kewajiban dari pemerintah pusat dan pemakaiannya tidak selalu terbatas oleh penduduk daerah dimana gedung-gedung itu didirikan, maka soal tanah yang biasanya jauh lebih luas dari pada yang di perlukan sekolah dasar, merupakan suatu soal yang kerap kali sukar diatasi dan jika mungkin dengan banyak biaya dan kebijaksanaan. Mengenai soal tanah ini ada suatu hal yang perlu disebut, yaitu mengenai adat yang kuat dimana tiap bidang tanah telah menjadi atau dianggap menjadi milik rakyat.³¹

Pada permulaan kemerdekaan jumlah sekolah-sekolah lanjutan sangat sedikit, karena sekolah-sekolah ini hannya ada di tempat-tempat besar di beberapa tempat bekas sekolah HIS yang pada umumnya cukup baik dipergunakan untuk sekolah-sekolah lanjutan yang berarti menambah jumlah sekolah rakyat yang harus didirikan. Sebagai Negara muda Indonesia mendapat tawaran “gadung-gedung jadi” yang kita kenal sebagai *prefabricated schoolbuilding* yang pada umumnya bantuk ukurannya serta kadaannya disesuaikan dangan tempat sederhana digambarkan, disamping pemesanannya dan pengangkutannya dari pelabuhan ke pelabuhan dengan

³⁰ *ibid.*, hlm.,288

³¹ *ibid.*,

saluran-saluran *hierarchie* di Indonesia melalui jalan yang sangat berliku-liku.

Bekas-bekas gedung milik asing yang ditinggalkan atau dinyatakan menjadi milik pemerintah RI, rumah-rumah, dan gedung-gedung yang ditinggalkan banyak yang dipakai untuk sekolah. Sekolah asing yang ditutup, gedungnya memberi tambahan ruang belajar pada anak-anak kita. Gedung-gedung untuk universitas lebih-lebih sangat lambat pembangunannya, universitas tua yang didirikan dan dipelihara oleh republik adalah universitas Gajah Mada. Hanya berkat bantuan dari Sri Sultan Hemengkubwono IX yang memberi izin pemakaian dari pada bangunan-bangunan seperti pagelaran, disamping kediaman-kediaman seorang pangeran atau (bupati).³²

Pada umumnya dimana-mana pembangunan gedung-gedung untuk pendidikan menengah dan tinggi merupakan beban dari pemerintah pusat sangat seret dijalankan. Kurangnya anggaran belanja, kemudian sukarnya mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan dan harus diangkut dari tempat yang sangat jauh atau biasanya di pelabuhan. Kurangnya tenaga kerja yang terlatih, semuanya merupakan hambatan-hambatan yang sangat nyata. Pembangunan gedung-gedung sekolah oleh pihak badan-badan pendidikan swasta meskipun juga tidak begitu lancar, pada umumnya lebih lancar daripada pemerintah. Hal ini letaknya dalam kebebasannya untuk dikalangan masyarakat dan peminat-peminat mengadakan pengumpulan dana, disamping sumbangan-sumbangan dari orang-orang tua yang langsung

³² *ibid.* hlm., 290

berkepentingan. Dengan demikian badan pendidikan swasta pada umumnya memiliki gedung-gedung sendiri yang jumlahnya cukup banyak.³³

B. DARI BIDANG SOSIAL

Mudah difahami bahwa masyarakat sendiri lebih-lebih masyarakat pendidik berhasrat juga untuk menyumbangkan untuk tenaga dan pemikiran guna membangun pendidikan dan pengajaran, maka suatu musyawarah pendidikan yang dilaksanakan pada bulan April 1947 menyelenggarakan pertemuan-pertemuan di Surakarta guna membahas masalah-masalah pendidikan untuk bangsa yang merdeka dan ditinjau dari semua sudut dan berhubungan dengan sebanyak-banyaknya kemungkinan. Yang menjadi pokok pembicaraan pada pertemuan yang berlangsung pada tanggal 4, 5, 6, dan 7 April 1947 antara lain:

1. Masalah perguruan tinggi.
2. Masalah pembaharuan pengajaran menengah.
3. Masalah pembaharuan pengajaran rendah.
4. Masalah pendidikan kewanitaan.
5. Masalah pendidikan masyarakat.
6. Masalah hubungan pendidikan dengan kemiliteran dan pertahanan negara .
7. Masalah susunan sekolah golongan teknik.
8. Masalah tempat penyelidikan para psikology.
9. Masalah tantang kebudayaan.

³³ *ibid.* hlm. 291

10. Masalah olahraga dan pembangunan.

11. Masalah pancasila.

12. Masalah kewajiban belajar.

Dari pengikut-pengikut musyawarah pendidikan itu antara lain nama-namanya sebagai berikut: prof. Mr. Dr. Supomo, Dr. Wedya diningrat, prof. Mr. Sunaryo Kolopaking, Soetejo Brodjonegoro, S. Mangun sarkoro, Mr. KRT. Wongsonegoro, Djen. Mayor Soewardi, Mas Kusrin, prof. Dr. Sardjito, St. Moh. Zain dan Ki cokrodirjo.³⁴

Rasa tanggung jawab para pemimpin tersebut telah membawa mereka ke usaha ini dengan maksud bersama-sama mencari jalan untuk membangun nagara Indonesia secara aktif, dinamis dan progresif. Dari cita-cita pembaharuan antara lain oleh Soemidi Adisasmita di kemukakan dasar-dasar sebagai berikut : *colonial destructief, national conructief, burgerschap, practisch*, yang semuanya merupakan reaksi atas keadaan sebelum perang.³⁵

Telah tergores juga angan-angan untuk mempunyai pendidikan guru pada tingkat universitas yaitu 4 tahu sesudah SMA. Dari tinjauan S. Mangunsarkoro dapat diambil dari beberapa pendapatnya tentang peranan sekolah dalam masyarakat antara lain:

1. Sekolah menjadi pusat gerakan masyarakat.
2. Tiap-tiap guru menjadi motor gerakan masyarakat.
3. Tiap-tiap vak pengajaran menjadi factor kemajuan masyarakat yang nyata.

³⁴ *ibid.* hlm., 47

³⁵ *ibid.*

4. Tiap-tiap murid menjadi tenaga gerakan masyarakat yang sedang tumbuh.

Ketika dalam bulan Juli 1947 Belanda menyerbu ke daerah Republik, maka keadaan sekolah sangat berantakan yang diakibatkan oleh peperangan, pelajar yang berumur 14 ke atas banyak yang meninggalkan sekolah dan ikut dalam perjuangan.³⁶

Pemimpin kementerian PP dan K antara lain diintruksikan, bahwa dalam keadaan apapun juga pendidikan dan pengajaran tetap harus berlangsung. Sesudah tanggal 5 Agustus 1947 diadakan gencatan senjata maka menteri PP dan K dengan stafnya kembali ke Jogja dan menetap disana dengan staf yang sangat kecil dan kantor PP dan K tetap berada di Surakarta. Suatu usaha untuk mengembalikan mereka dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan terbentur kepada kekurangan tempat dan tenaga pendidik.³⁷

Meskipun pemerintahan Indonesia dalam keadaan yang sangat terpuruk masih melaksanakan hubungan dengan daerah luar Jawa dengan adanya komisi tiga Negara. Demikian hubungan dengan Sumatra dapat diselenggarakan berjalan dengan lancar tidak adanya putus komunikasi. Terutama dalam hal pendidikan guru yang mendapat perhatian yang sangat luar biasa, karena dalam bidang pengajar yang sangat dibutuhkan itu menjadi keharusan berlangsungnya komunikasi dengan lancar.³⁸

Hubungan luar negripun diselenggarakan, kementerian PP dan K mendapat kunjungan dari wakil pemerintah dari Australia yang meninjau

³⁶ *ibid.* hlm., 48

³⁷ *ibid.*

³⁸ *ibid.* hlm., 49

keadaan pengajaran di Indonesia. United States Information Service meminjamkan perpustakaan dengan jumlah buku 300 buah kepada pemerintah PP dan K. dari pemerintahan India diperoleh beasiswa sejumlah 7 buah dan ditambah biasiswa pemerintah Indonesia sendiri, maka dalam tahun 1948 dikirim ke India sebanyak 11 mahasiswa. Karena perhubungan sangat sulit, maka pengiriman ini merupakan suatu perjuangan yang hasilnya sangat baik dan memuaskan.³⁹

Dalam tahun 1948 diusahakan pengiriman seorang dari kementerian PP dan K ke Philipina untuk perkenalan dengan dunia pengajaran disana, akan tetapi usaha ini kemudian gagal oleh adanya kelas kedua dalam bulan Desember 1948. Sebelum kelas ini dunia pendidikan dan pengajaran yang sedang menjelang gerakan ujian-ujian penghabisan mengalami kekacauan dalam kedua kalinya dengan adanya peristiwa Madiun, yaitu pemberontakan komunis. Dengan datangnya Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 ke Negara Indonesia, maka usaha Kementerian PP dan K dalam memajukan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini mengalami kemacetan sementara. Tahun 1949 dengan persiapan Negara Indonesia yang lebih matang, akan membuka kembali sekolah-sekolah yang telah ditutup.⁴⁰

Suatu panitia penyuluhan pengajaran segera dibentuk yang diberi tugas berdasarkan atas pedoman-pedoman yang diberikan kementerian PP dan K, meninjau kembali seluruh rencana pendidikan dan pengajaran dari kindergarten sampai dengan perguruan tinggi. Laporan itu akan dijadikan pedoman selanjutnya dari kementerian PP dan K dalam menunaikan tugas,

³⁹ *ibid.*

⁴⁰ *ibid.* hlm., 51

karena diharapkan untuk tiap-tiap 2.000 penduduk harus ada satu sekolah rakyat, maka pendidikan guru untuk sekolah SR menjadi masalah besar. Untuk mengatasi ini pemerintah mendirikan sekolah yang dinamakan SGC, SGB, SGA.⁴¹

C. DARI BIDANG SARANA PRA SARANA

a. Tentang Gedung-Gedung Sekolah

Di bulan November 1973 keluar Instruksi Presiden yang menetapkan dana sebesar Rp. 15,8 milyar untuk suatu program besar-besaran suatu pembangunan unit-unit SD yang setiap unit terdiri dari tiga ruang kelas dengan perincian 6.000 unit di tahun 1973/1974, 6.000 unit di tahun 1974/1975 dan 10.000 unit di tahun 1975/1976. Keseluruhan meliputi jumlah 3.000.000 tempat duduk baru. Bersama dengan itu pembekuan pengangkatan pegawai baru di tahun 1968 dilonggarkan mengangkat 18.000 orang guru baru serta mengubah status sementara 41.000 guru menjadi guru tetap.⁴²

Seluruh program ini telah berhasil sepenuhnya di Jakarta, pembangunan gedung lengkap bahkan dengan perabotannya. Program ini berguna sekali untuk diteliti sebagai suatu contoh langkah-langkah cepat yang diperlukan untuk negeri seluas Indonesia, serta masalah-masalah yang timbul dari langkah-langkah demikian didalam suatu system yang sangat tersentralisir. Ketentuan-ketentuan digariskan sangat ketat yang dinyatakan sebagai berikut:

⁴¹ ibid

⁴² op. cit., C.E. Beeby (1979), hlm., 68

1. Tiap unit SD harus dibangun di tanah baru sebagai bagian dari sekolah baru, program ini tidak boleh di belokkan untuk mengganti atau memperbaharui gedung sekolah yang sudah ada. Alasannya adalah karena sekolah-sekolah baru ini disediakan untuk anak-anak yang tadinya tidak tertampung di sekolah-sekolah yang telah ada.
2. Sebelum diangkatnya guru-guru, guru-guru yang diambil hanya guru-guru yang yang belum dapat penyaluran, ini dimungkinkan agar tidak terjadi penyedotan dari guru-guru sekolah yang sudah ada dipindahkan ke sekolah-sekolah yang baru. Disamping itu juga untuk memberi kesempatan kepada guru-guru yang belum mendapat tempat mengajar.
3. Pemilihan lokasi-lokasi SD baru itu diserahkan pemerintah untuk penentuannya kepada pemerintah setempat.
4. Meskipun petunjuk-petunjuk yang di buat tidak menjelaskannya, tapi unut sekolah yang terdiri dari tiga ruang ruang kelas itu dimaksudkan sebagai langkah pertama kea arah pembangunan gedung sekolah lengkap yang terdiri dari enam kelas.⁴³

Hasil penelitian di Jawa Timur mungkin tidak mencerminkan seluruh keadaan, namun petugas penelitian itu percaya hasil itu akan berlaku untuk seluruh Jawa Timur dan perhitungan kasar dari propinsi-

⁴³ loc.cit., C.E .Beeby (1979), hlm,. 70

propinsi lain memberi petunjuk bahwa tingkat kemajuan di sana secara umum memuaskan.

b. Laboratorium IPA

Repelita II menjanjikan sebuah laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam untuk tiap SLTP, dan dua untuk SLTA yaitu untuk biologi dan fisika dan satu lagi untuk kimia. Menjelang akhir 1975 proyek inipun mengalami kemajuan pesat, diharapkan ruangan dan perlengkapan laboratorium- laboratorium itu akan di cukupi pada tahun 1976 yaitu 1471 di SLTP dan 426 di SLTA. Sedang disiapkan pusat latihan yang akan memberikan latihan selama tiga bulan kepada guru ahli untuk bekerja di laboratorium biologi, kimia, dan fisika.⁴⁴

Guru ahli akan bertanggung jawab memberikan latihan intensif selama tujuh minggu kepada guru-guru ipa di wilayahnya. Mengingat umumnya guru-guru itu tidak biasa dengan pekerjaan laboratorium, padahal mereka harus memberikan pelajaran dalam siklus tiga tahun, maka penataran lebih lanjut perlu diadakan secara preodik.⁴⁵

c. Buku Tulis

Proyek Pendidikan Ketiga untuk menghasilkan 138 juta buku teks SD bagi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menimbulkan masalah lebih besar lagi dalam hal perencanaan dan organisasi dibandingkan dengan masalah SD Inpres dan laborrtorium IPA-

⁴⁴ loc, cit, C.E .Beeby (1979). hlm. 72

⁴⁵ ibid.

sekiranya ia dihadapi dengan semangat yang sama. Di sini banyak sekali kegiatan yang berbeda-beda sifatnya yang harus disinkronisasikan. Koordinasi semua bagian yang saling berhubungan yang ada di Departemen, mengurus keuangan dari tiga sumber dalam negeri maupun internasional, mengubah kurikulum dalam empat mata pelajaran, penulisan buku-buku, menguji dan melakukan revisi, mendapatkan kertas dan penerbit yang mau mencetak dan menyalurkan buku-buku itu, menyusun satu jaringan organisasi yang kompleks di tingkat nasional, propinsi dan daerah yang lebih bawah lagi, dua tiga tahun lebih dulu pendidikan tenaga guru untuk disesuaikan dengan kurikulum dan buku teks baru, penataran penatar-penatar guru serta tenaga administrasi, latihan bagi para penilik, kepala sekolah dan guru daerah-daerah, penyediaan pengangkutan bagi para penatar dan pengawas, mempersiapkan latihan lanjutan bagi para guru setelah mereka kembali ke sekolah masing-masing, memonitor operasi ini di tiap tahap, membuat evaluasi yang mendalam akan pengaruhnya pada proses belajar mengajar. Adanya kegagalan dalam koordinasi dan sinkronisasi unsur-unsur pokok dalam jaringan ini dapat memporak porandakan seluruh rencana atau sekurang-kurangnya mengurangi nilai buku-buku itu.⁴⁶

Buku teks baru bahasa Indonesia isinya banyak kesamaan yang lama, meski buku baru ini menuntut metode baru jika bukan tujuan-tujuan baru. Perubahan dari aritmatika lama ke matematika baru. Mengingat isi metode dan tujuan mengenai mengenalkannya

⁴⁶ lok. Cit, C.E .Beeby (1979). hlm., 73

matematika di SD dimana begitu besar jumlah murid putus sekolah sebelum manfaat dari pelajaran itu diperolehnya. Memang benar bahwa semua buku, baik yang sudah maupun yang akan di uji telah keluar sebelum di masukkan ke sekolah-sekolah. Buku Bahasa Indonesia untuk kelas I misalnya, telah diuji di sekolah percobaan tahun 1970/1971 dan di tahun 1974 pengujian itu diteruskan ke 65 sekolah di luar Jakarta. Buku-buku matematika juga tampaknya telah diuji pada sekolah-sekolah percobaan. Namun tetap terdapat perbedaan antara guru-guru di sekolah percobaan yang dilatih dan dibimbing oleh tenaga yang dekat dengan asal-asal sumber buku itu dengan guru-guru yang jauh di pelosok-pelosok yang dilatih oleh “tangan kedua” team penatar keliling. Mayoritas dari para penatar itu sendiri tidak pernah menggunakan buku-buku baru itu di sekolah dan barang kali tidak pernah pula melihatnya digunakan di kelas-kelas. Pengalaman praktek mengajar mereka sendiri mungkin hanya dari “kelas mini” yang dibuat di kalangan peserta latihan itu sendiri. Kuliah yang diberi kepada team-team seringkali memikat dan merangsang dan kuliah yang diberikannya kepada para “guru ahli” dan guru-guru umum akan cenderung mengikuti model yang sama, meskipun hal ini masih amat lama sekali untuk bisa dikuasai pada pengalaman yang lebih praktis yang diperoleh pada saat mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Para pengawas yang kelak akan mengawasi cara pengajaran itu justru mungkin mendapat latihan yang lebih singkat daripada yang diperoleh guru. Sejauh yang bisa saya kumpulkan, sedikit sekali persiapan yang dibuat untuk mengikuti secara sistematis

perkembang guru-guru di kelas kelak, padahal masalah ini amat penting. Ada rencana untuk mengadakan semacam pusat-pusat sumber wilayah tapi sampai sekarang tidak tersedia dana untuk itu.⁴⁷

Buku-buku, bahkan bagian-bagian dari buku-buku itu akan sangat berbeda-beda mutu dan kecocokannya dengan rata-rata guru. Tidak disanksikan lagi bahwa revisi-revisi itu diperlukan, dan bahkan barangkali perlu ada cara darurat mengatasi kesukaran yang terapat pada bagian-bagian buku-buku itu yang tidak bisa negara dicetak kembali. Naskah buku teks untuk kelas-kelas yang lebih tinggi bisa juga diperbaiki berdasarkan pengalaman dengan buku-buku di kelas rendah. Di akhir 1975, sekarang konsultan luar negeri yang telah didatangkan untuk memberi saran-saran mengenai evaluasi proyek hingga akhir 1976, dan suatu usul yang sangat umum telah diajukan. Usul itu meliputi Bahasa Indonesia sampai kelas II, matematika di kelas I, dan IPS di kelas III. Terdapat batas-batas yang ditunjukkan oleh pengujian resmi, di kelas I dan II, khususnya apabila pengujian berkelompok. Tapi evaluasi di sini juga akan meliputi pengamatan di kelas-kelas, pengiriman *questionnaire* kepada para pengawas, "guru ahli" dan guru-guru umum serta pengumpulan data mengenai sistem penyebaran dan latihan. Evaluasi ini akan merupakan kunci bagi masa depan proyek ini. Dengan laporan yang direncanakan keluar di bulan Maret 1977, terlalu tergesa-gesa bagi seorang luar untuk meramalkan hasil-hasilnya. Namun saya harap evaluasi itu akan menyingkapkan masalah-masalah yang paling

⁴⁷ lok. Cit, C.E. Beeby (1979). hlm., 74

sulit akan timbul dari kemampuan rata-rata guru, yang dengan latihan-latihan yang terbatas ini bisa melakukan lompatan yang dari buku-buku lama ke buku-buku yang baru.⁴⁸

d. BUKU TEKS SEKOLAH LANJUTAN

Rencana pengadaan buku teks cuma-cuma untuk sekolah lanjutan telah dimulai di Pelita I, dan telah dipercepat pada Pelita II dengan membuat target 40 juta buku teks untuk 2 juta siswa SLTP sampai tahun 1978 meliputi mata-pelajaran bahasa Indonesia, biologi, fisika, matematika, ilmu pengetahuan sosial dan bahasa Inggris. Di samping itu buku-buku umum secara tetap mengisi ruang baca dan perpustakaan sekolah yang didirikan di tiap sekolah. Juga disediakan 5 juta buku teks baru untuk SLTA meliputi mata-pelajaran yang sama dan juga buku-buku teknik dalam bahasa Indonesia. Menjelang akhir 1975, kurikulum baru SLTP telah siap untuk dicobakan secara partial di tahun 1976, banyak dari buku teks itu telah selesai ditulis dan di antaranya banyak yang telah di salurkan. Seperti dijelaskan di Catatan B di atas, kursus penataran selama 6-7 minggu diberikan kepada guru-guru ahli untuk mempersiapkan para guru yang akan menggunakannya. Kesulitan-kesulitan muncul di beberapa sekolah mengenai buku-buku matematika baru, dan disadari bahwa pelajaran ini tak bisa diajarkan sepenuhnya tanpa kursus tambahan bagi guru-guru yang tidak begitu mengenal matapelajaran ini. Di beberapa distrik terdapat pula tantangan dari para orangtua terhadap matematika baru itu dan di beberapa tempat

⁴⁸ lok. Cit, C.E. Beeby (1979). hlm., 75

berkembang menjadi *issue* politik. Seperti juga di SD, kurikulum ilmu pengetahuan sosial dan buku-buku teksnya masih bertahan karena pemerintah bersikeras agar Pancasila diajarkan sebaga mata pelajaran sendiri. Tak lebih yang bisa saya katakan mengenai rencana buku teks sekolah lanjutan karena saya tak punya pengalaman langsung mengenai hal ini, juga masalah tersebut muncul belakangan sehingga PPNP tak sempat menanganinya.⁴⁹

⁴⁹ lok. Cit, C.E .Beeby (1979). hlm,.76



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
SUNAN GIRI BOJONEGORO**

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka mengenai masalah pendidikan yang ada di Indonesia dari waktu ke waktu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan yang ada di Indonesia adalah warisan berbagai kalangan penjajah, pendidikan sebelum datangnya penjajah hanyalah merupakan pendidikan yang sangat sederhana yang diadakan oleh agama Hindu-Buda, sedangkan pendidikan yang menggunakan system pengajaran itu dimulai pada saat datangnya para kalangan penjajah di Negara Indonesia ini.
2. Perubahan-perubahan system pendidikan yang sangat sering dilakukan dizaman penjajahan sangatburuk dan berkwalitas rendah, yang sehingga masyarakat Indonesia tidak mampu untuk maju seperti masyarakat Negara lain.
3. Proses-proses perubahan menuju Indonesia merdeka merupakan hal yang sangat sulit, karena dalam masa penjajahan tidak hanya kekayaan alam dan penduduknya saja yang dijajah, tapi pendidikan pun takluput dari jajahan mereka. Dengan mendirikan gedung-gedung persekolahan, para penjajah

memberikan pengajaran kepada anak didik yang isinya hanyalah untuk kepentingan pemerintahan mereka sendiri.

4. Pada masa penjajahan Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dengan sulitnya mendapatkan pendidikan masyarakat menyekolahkan anak-anaknya dengan fasilitas seadanya.
5. Peran pesantren pada waktu itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan ilmu pendidikan.
6. Jalannya pendidikan yang ada di Indonesia ini melalui beberapa tahap yang sangat sulit dan membutuhkan perjuangan yang sangat keras. Dalam perjuangannya tidak hanya menggunakan akal pikiran atau tenaganya saja tetapi nyawapun menjadi taruhan untuk memperjuangkan pendidikan.
7. Perkembangan pendidikan di Indonesia baru berkembang setelah adanya perbanyakan gedung-gedung sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi yang diadakan di berbagai wilayah kota dan wilayah pedesaan.
8. Dari beberapa kesimpulan diatas dapat kita lihat alangkah sulitnya mewujudkan Indonesia merdeka secara keseluruhan.

B. SARAN-SARAN

Dalam memahami perubahan-perubahan system pendidikan yang ada di Negara ini harus dibutuhkan wawasan yang luas, terutama harus menoleh kearah belakang untuk mempelajari sejarah pendidikan di Negara

kita ini. Karena dengan demikian kita dapat melihat perubahan-perubahan system pendidikan di Indonesia.

Kebanyakan anak didik Indonesia saat ini tidak begitubanyak mengetahui perubahan-perubahan system pendidikan di Negara Indonesia ini, padahal dengan mengetahui jalannya perubahan dan usaha yang dilakukan pejuang pendidikan di Indonesia untuk merubah system pendidikan para anak didik akan merasa mempunyai tanggungjawab dan berusaha memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya.

Selain anak didik, ada yang harus wajib melihat dan meresapi tentang perjuangan pendidikan di masa penjajah, yaitu para pendidik, dengan demikian mereka akan tau susahny memperjuangkan pendidikan pada masa itu.